

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan berbagai hal termasuk tujuan terlaksananya masyarakat adil dan makmur. Dengan tujuan melaksanakan itu dari awal kemerdekaan, sehingga pemerintah bekerja keras pada masa ke masa. Kata makmur mempunyai arti penting bagi negara, yang artinya menghendaki negara mewujudkan kesejahteraan untuk warganya. Dalam kehidupan bermasyarakat di setiap negara, kesejahteraan sosial merupakan kebutuhan yang seharusnya menjadi prioritas yang diutamakan oleh pemerintah. Setiap pemimpin mempunyai kewajiban dalam menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam hal ini kesejahteraan sangat dibutuhkan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negara- negara di dunia, khususnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kondisi fisik maupun ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada September tahun 2017 penduduk miskin Indonesia berjumlah 26,58 juta jiwa dan september pada tahun 2019 berjumlah 24,79 juta jiwa Penduduk Miskin di Indonesia.

Kemiskinan dan kebutuhan Pangan di Indonesia merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah dari masa ke masa. dimana masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara

terpadu dan berkelanjutan. Dalam upaya menuntaskan masalah kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan, Dalam hal ini pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat agar mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Sebagai salah satu bentuk pemerintah dalam membantu masyarakat mencukupi kebutuhan pokok dan ekonomi pada masyarakat, pemerintah membentuk salah satu program yang dinamakan BPNT (bantuan program non tunai) bantuan pangan atau non tunai ini merupakan bentuk kebijakan dari program bantuan social pangan yang diluncurkan oleh pemerintah dalam bentuk pangan untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli pangan pada pedagang pokok (*ewarong*) yang bekerja sama dengan bank. Kebijakan BPNT ini telah diatur oleh PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai.

Program bantuan pangan non tunai atau BPNT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Dana bantuan yang di berikan oleh pemerintah yaitu program sembako. Tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein, dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam dan makanan yang lainnya. Kebijakan ini sangat bisa membantu masyarakat yang

terdampak covid-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepersertaan program sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Para penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak hanya peserta program keluarga harapan (PKH) saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik. Di dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik terdapat sistem *Saving account* dan *e-Wallet* atau dompet elektronik, sehingga peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil observasi diperoleh informasi bahwa sebanyak 546 keluarga tercatat sebagai KPM di Desa Pada Asih. Berikut ini adalah proporsi setiap RW di Desa Pada Asih yang mendapatkan BPNT:

Tabel 1. 1 Data Keluarga Penerima Manfaat

Bulan	Kuota	ATM Bisa Dicairkan						ATM Bermasalah					
		RW						RW					
		01	02	03	04	05	Jml	01	02	03	04	05	Jml
Agu-20	270	79	28	63	48	45	263	2	1	2	1	1	7
Sept-20	270	77	19	62	46	42	246	4	10	3	3	4	24
Okt-20	270	72	2	64	45	12	195	9	27	1	4	34	75

Bulan	Kuota	ATM Bisa Dicairkan						ATM Bermasalah					
		RW						RW					
		01	02	03	04	05	Jml	01	02	03	04	05	Jml
Nov-20	270	76	5	41	0	15	137	5	24	24	49	31	133
Des-20	270	77	4	32	0	11	124	4	25	33	49	35	146
Jan-21	270	75	4	28	0	11	118	6	25	37	49	35	152
Feb-21	270	62	5	28	0	11	106	19	24	37	49	35	164
Mar—Apr-21	270	69	2	22	0	11	104	12	27	43	49	35	166
Mei-Jun-21	270	70	3	27	0	10	110	11	26	38	49	36	160
Jul-Sept 21	270	68	3	24	0	15	110	13	26	41	49	31	160
Apr-22	546	131	0	80	0	13	224	31	63	56	96	76	322
Jun-Jul-22	549	134	41	75	0	12	262	31	22	61	96	77	287

Sumber : Pemerintah Desa Pada Asih, 2022

Pada Tabel 1.1 tampak rekapitulasi keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai di Desa Pada Asih dari bulan April 2020 sampai dengan Juli 2022.

Pada tabel 1.1 menunjukkan adanya kenaikan kuota pada bulan April 2022 menjadi 546 penerima dan pada bulan Juni-Juli 2022 menjadi 549 penerima. Namun pada seiring dengan kenaikan kuota pada bulan April 2022 tampak kenaikan jumlah KPM yang tidak dapat mencairkan bantuan karena ATM yang dimilikinya eror. Sebanyak 322 KPM. Permasalahan tersebut sudah mulai teratasi pada bulan Juni-Juli 2022 yang diindikasikan dengan adanya penurunan ATM bermasalah menjadi 287 KPM, sehingga terjadi kenaikan pada jumlah KPM yang dapat melakukan pencairan bantuan.

Bagi KPM yang mendapatkan BPNT dan dana bantuan tersebut masih tersisa atau tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara

otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya. Dengan adanya KKS, peserta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti (beras, gula, tepung, minyak goreng dan lain- lain), melalui agen yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

Tetapi tidak dengan Kecamatan Pasirwangi, pada pelaksanaannya program BPNT di Kecamatan Pasirwangi masih terdapat beberapa permasalahan terkait pembagian BPNT yang dilakukan oleh Dinsos. Fakta di lapangan terdapat ketidaktepatan dalam pembagian, karena BPNT yang di salurkan di Kecamatan Pasirwangi bukan dengan agen yang seharusnya, tetapi diambil alih dengan Desa sebagai penyalur. Karena dalam prosedur yang dilaksanakan seharusnya agen bertanggung jawab kepada Keluarga Penerima Manfaat, bukan Desa. Permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pihak terkait, karena dalam faktanya sudah tidak bisa dibenarkan terkait penyaluran yang diberikan oleh Desa.

Selain itu, komunikasi juga harus bisa berjalan dengan baik, dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinsos harus jelas, karena pada kenyataannya terjadi masalah di lapangan mengenai penyaluran BPNT, yang seharusnya agen bertanggung jawab kepada KPM, malah desa yang mempertanggungjawabkan tentang penyaluran BPNT yang diberikan di Kecamatan Pasirwangi.

Komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan *feedback* dari penerima pesan. Dari proses komunikasi

akan menimbulkan pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Pola merupakan suatu konsep untuk menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi ciri khas dari sesuatu. Dalam konteks komunikasi, pola komunikasi merupakan konsep untuk menjelaskan tentang proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan, ciri khas, atau budaya dari suatu masyarakat tertentu (Hidayatullah 2018).

Untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan dinsos maka dinsos harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kecamatan Pasirwangi, dan juga untuk mengkaji strategi komunikasi yang dilakukan peneliti, maka peneliti menggunakan teori Strategi Komunikasi dengan teori strategi komunikasi model Anwar Arifin sebagai acuan dasar yang akan digunakan pada penelitian ini, terdapat berbagai strategi komunikasi menurut (Arifin, 2008), yaitu Mengenal Khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode dan seleksi dan penggunaan media..

1.2 Fokus Penelitian Dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Agar pembahasan ini tidak terlalu melebar dan tidak terlalu luas, maka peneliti akan mengambil pokok permasalahannya, maka penulis membuat fokus permasalahan tentang bagaimana Strategi Komunikasi Tentang Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Pada Asih.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *fact finding*?
2. Bagaimana strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *planning*?
3. Bagaimana strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *communication*?
4. Bagaimana strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *evaluating*?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan dinsos dalam program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk menguraikan strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *fact finding*.
2. Untuk menguraikan strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *planning*.

3. Untuk menguraikan strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *communication*.
4. Untuk menguraikan strategi komunikasi dalam program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Pada Asih berdasarkan *evaluating*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan. Manfaat itu adalah untuk memperkuat teori yang telah ada. Nantinya, diharapkan teori tersebut semakin banyak digunakan sebagai penunjang penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan yang merupakan bentuk dari kegunaan praktis, di antaranya:

1. Untuk Masyarakat Penerima KPM

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu serta sumber literasi baru bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat lebih memahami program-program yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraannya dan sebagai tambahan untuk memberikan pemahaman dan memberikan informasi penerima BPNT dan juga Untuk mengetahui bagaimana sistem di dalam program BPNT

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi calon peneliti selanjutnya.
Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baru khususnya bagi mereka
yang hendak